

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN PANDEGLANG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dapat tersusun. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang dipakai sebagai acuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik.

Indikator Kinerja Utama ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dengan menekankan sasaran strategis bidang kesejahteraan sosial yang akan dicapai selama lima tahun.

Sudah barang tentu penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan IKU ini.

Pandeglang, Maret 2024
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pandeglang

Hj. NURIAH, SKM, M.SI
Pembina Tingkat I IV/c
NIP. 19660508 198703 2 006

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Sasaran | 4 |
| 1.3 Landasan Hukum..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 9 |
| 2.1 Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama..... | 9 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang | 10 |
| BAB III PENUTUP | 17 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja (*performance*) adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada suatu organisasi dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerja akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan

indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:

1. Kompetensi, berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktifitas, kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*).

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*outcome*). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang

mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.

Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah serta Perubahan/Penambahan Indikator Kinerja Utama di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Juknis DAU yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Dan PMK 097 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menetapkan indikator kinerja utama Tahun 2025 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Adapun tujuan disusunnya indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor).
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pandegang.

1.1 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian IKU SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan IKU SKPD.
- 1.3 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan IKU SKPD.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan IKU SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) berisikan ukuran/ indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

BAB III PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, Rencana Strategis dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang melibatkan kepentingan (stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu :

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada Dinas Sosial dapat dirinci disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Juknis DAU yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Dan PMK 097 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai).

I. Sasarannya yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Adapun nama Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Dengan Tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK. dengan komponen sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Renja Awal, Renja Perubahan, Renja akhir;
2. Jumlah Dokumen RKA;
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA;
4. Jumlah Dokumen DPA;
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA;
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD;
7. Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah;
8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

9. Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan;
10. Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah;
11. Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah;
12. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang digunakan ;
13. Jumlah Peralatan Rumah tangga yang digunakan;
14. Jumlah tamu dalam Kegiatan;
15. Jumlah unit barang Perangkat Daerah;
16. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
17. Jumlah waktu penggunaan jasa pelayanan umum kantor perangkat daerah;
18. Jumlah Unit barang Operasional yang dipelihara;
19. Jumlah gedung/bangunan perangkat daerah;
20. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.

Rumus : a.

$$= \frac{\Sigma \text{pegawai yang mempunyai nilai SKP baik}}{\Sigma \text{pegawai}} \times 100\%$$

b. 1. Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.

Sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial
2. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.

Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan cara pemberian bantuan berupa barang atau uang ataupun dengan cara pemberian pelatihan dan keterampilan berusaha agar masyarakat miskin dapat hidup mandiri. Meningkatkan perlindungan dan pemberian bantuan hak dasar hidup serta bimbingan dan motivasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Meningkatkan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan. Dengan Melaksanakan pembangunan rumah singgah "Imah Barudak" bagi anak terlantar dan anak jalanan.

Adapun ke 4 (Lima) Program yang mendukung sasaran tersebut adalah : Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Dengan Komponen Penyesuaian PMK 110 dan 097 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikatornya Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, indikatornya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

- Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikatornya, Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Permakanan, Indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota;
 5. Penyediaan Alat Bantu, indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 6. Jumlah Peserta Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.
 7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Masyarakat, indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;

10. Pemberian Layanan Rujukan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikatornya Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan HIV/AIDS dan NAFZA, Jumlah peserta dalam Bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan HIV/AIDS dan NAFZA kewenangan Kabupaten/Kota.
13. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, menjadi Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, indikatornya Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota;
14. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota;
15. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, menjadi, indikatornya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, menjadi Pengembangan Ekonomi

- Perempuan, Indikatornya Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Penyediaan Makanan, Indikator Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan;
18. Penyediaan Sandang, indicator Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, indicator Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Kewenangan Kabupaten/Kota.
20. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, indicator Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Kewenangan Kabupaten/Kota.

Rumus :

a.

$$= \frac{\Sigma \text{PMKS yang Tertangani}}{\Sigma \text{PMKS}} \times 100\%$$

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pandeglang

Hj. NURIAH, SKM, M.SI
Pembina Tingkat I IV/c
NIP. 19660508 198703 2 006

LAMPIRAN I

| Indikator Kinerja Sasaran | Cara Pengukuran (setelah reviu) | Keterangan / Kriteria (setelah reviu) |
|---|---|---|
| 1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai). | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Tata kelola layanan dasar peringkat daerah sesuai standar |
| 2. Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar. | Menurunnya permasalahan kesejahteraan social . | Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya |
| 3. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan. | Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan | Jumlah Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang tertangani |

LAMPIRAN II

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial
3. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.

**LAMPIRAN III
CASCADING BELANJA DASAR**

| NO. | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | Satuan | SUB KEGIATAN |
|-----|--|---|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK. | IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. | meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indek Reformasi Birokrasi | I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah | Laporan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |

| NO. | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | Satuan | SUB KEGIATAN |
|-----|------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | | pada SKPD | | pada SKPD |
| | | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota. | Unit | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |

**LAMPIRAN IV
CASCADING BELANJA WAJIB**

| Visi | Misi | Tujuan dan Indikator | | | Sasaran dan Indikator | | OPD Penanggung Jawab | Program Unggulan Bupati | Eselon II | | | | | Eselon III | | | | Program | Eselon IV | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|--------|---|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tujuan | Indikator | OPD Penanggung Jawab | Sasaran | Indikator | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sub Kegiatan |
| Pandeglang Berkah, Berdaya Saing dan Sejahtera | Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia | Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. | Indeks Pembangunan Manusia (nilai) | Setda (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) | Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial | Jumlah PMKS (jumlah) | Dinas Sosial | Imah barudak | Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS | Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial | Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah keluarga miskin dibagi 100 | Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial | jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | jumlah | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial dibagi jumlah keluarga miskin x 100 | PROGR AM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN AN SOSIAL | Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantaraan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | KPM | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantaraan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terpenuhinya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | KPM | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terpenuhinya Pengembangan Ekonomi Perempuan | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Orang | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |

| Visi | Misi | Tujuan dan Indikator | | | Sasaran dan Indikator | | OPD Peninggalan Jawab | Program Unggulan Bupati | Eselon II | | | | | Eselon III | | | | Program | Eselon IV | | | | |
|------|------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--------|---|---|--|---|--|--|---|
| | | Tujuan | Indikator | OPD Penanggung Jawab | Sasaran | Indikator | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | at /Kota | | at Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng di luar panti | Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng di luar panti | Persen | Jumlah Jenis PMKS yang mendapat bantuan dibagi Jumlah Jenis PMKS di kali 100 persen | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terlaksananya bimbingan fisik,mental dan spiritual | Jumlah Peserta bimbingan fisik,mental dan spiritual | orang | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, Siritual dan sosial. | Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Siritual dan sosial. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tersedianya Alat bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhannya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhannya Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Alat Bantu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai Standar Gizi Minimal | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan | Penyediaan Permakanan | |

| Visi | Misi | Tujuan dan Indikator | | | Sasaran dan Indikator | | OPD Penanggung Jawab | Program Unggulan Bupati | Eselon II | | | | | Eselon III | | | | Program | Eselon IV | | | | |
|------|------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|--------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--------------|
| | | Tujuan | Indikator | OPD Penanggung Jawab | Sasaran | Indikator | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar | n Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | n Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar | Perbaikan Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | Pemberian Layanan Data pengaduan | |

| Visi | Misi | Tujuan dan Indikator | | | Sasaran dan Indikator | | OPD Penanggung Jawab | Program Unggulan Bupati | Eselon II | | | | | Eselon III | | | | Program | Eselon IV | | | | |
|------|------|----------------------|-----------|----------------------|---|---|----------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--|--|---|--------|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | Tujuan | Indikator | OPD Penanggung Jawab | Sasaran | Indikator | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bukan Korban HIV/ AIDS | | Bukan Korban HIV/ AIDS | HIV/AIDS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan | Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%) | Dinas Sosial | Imah Barudak | | | | | Total anak terlantar dan anak jalanan yang mendapat bantuan pemerintah | Meningkatnya Pemeliharaan terhadap Anak terlantar dan anak jalanan | Persentase Pemeliharaan Anak terlantar dan anak jalanan | Persen | Jumlah Jenis PMKS yang mendapat bantuan dibagi Jumlah Jenis PMKS di kali 100 persen | | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemantauan terhadap anak terlantar |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terlenuhinya kebutuhan dasar pebekalan kesehatan kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah orang nini aki yang mendapatkan pebekalan kesehatan kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pebekalan | Pebekalan kesehatan | |

| Visi | Misi | Tujuan dan Indikator | | | Sasaran dan Indikator | | OPD Penanggung Jawab | Program Unggulan Bupati | Eselon II | | | | Eselon III | | | | Program | Eselon IV | | | | | | |
|------|------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------|---|--|----------------------------|--------|--|--------------|--|
| | | Tujuan | Indikator | OPD Penanggung Jawab | Sasaran | Indikator | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Penjelasan/Formula Perhitungan | Sub Kegiatan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | n/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota | n/Kota | Peningkatan kemampuan potensi tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |